PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Oleh
Emiriyah Yusnia Izzah
NIM. 05040422074

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Emiriyah Yusnia Izzah
NIM	:	05040422074
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul	:	Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Maqāṣid Al-syarī'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Maret 2026

Yang menyatakan,



Emiriyah Yusnia Izzah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Emiriyah Yusnia Izzah

NIM : 05040422074

Judul : Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 16 Maret 2026

Pembimbing,

Elva Imeldatur Rohmah,S.H.I, M.H

NIP. 199204022020122018

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Emiriyah Yusnia Izzah
NIM.	:	05040422074
Judul	:	Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Elva Imeldatur Rohmah,S.H.I, M.H
NIP. 199204022020122018

Penguji II

Prof Dr. Hj Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Hj. Ifa Mutiatul Choiroh,S.H., M.Kn.
NIP. 1979033120077102002

Penguji IV

Hurin Hayati Alin, S.Hub.Int., M.h
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 19 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sofiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Emiriyah Yusnia Izzah
NIM : 05040422074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik/Hukum Tata Negara
E-mail address : yusniaemir@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara
Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 November 2026

Penulis

(Emiriyah Yusnia Izzah)

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat adat yang telah lama tinggal dan bergantung pada wilayah mereka. Pengadaan tanah untuk pembangunan IKN menimbulkan isu tentang pengakuan hak ulayat, kepastian hukum, keterlibatan masyarakat adat, serta perlindungan terhadap ruang kehidupan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Walaupun berbagai peraturan hukum telah mengakui eksistensi masyarakat adat, implementasinya masih menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Situasi ini menuntut dilakukannya penelitian tentang seberapa efektif perlindungan hukum yang diberikan oleh negara serta mengevaluasi kebijakan tersebut dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara dan peraturan-peraturan yang relevan, sementara sumber hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh materi hukum dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deduktif dengan menggabungkan teori perlindungan hukum dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam kebijakan relokasi Ibu Kota Negara belum sepenuhnya menjamin hak-hak masyarakat adat. Masalah masih terdapat dalam proses pengakuan hak ulayat, cara pengadaan tanah, pemberian kompensasi, serta kurang optimalnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan ini belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan terhadap *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan), karena masih ada potensi kehilangan ruang hidup, terganggunya keberlanjutan lingkungan, serta berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat adat.

Situasi ini menandakan bahwa arah pembangunan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat. Kebijakan ini diperlukan melalui peningkatan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, pembukaan ruang partisipasi di setiap tahap pembangunan, serta penciptaan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efisien. Pengintegrasian nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Pembuatan dan penerapan kebijakan diharapkan dapat merealisasikan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan negara, tetapi juga memastikan keadilan, manfaat, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PENGESAHAN..... **ii**
ABSTRAK..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI..... **ii**
DAFTAR GAMBAR.....**xi**
DAFTAR TRANSLITERASI..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....9
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian.....11
E. Manfaat Penelitian.....11
F. Penelitian Terdahulu.....13
G. Landasan Teori 18
H. Definisi Operasional.....24
I. Metode Penelitian.....28
J. Sistematika Pembahasan 33
BAB II KERANGA TEORITIS.....**34**
A. Teori Perlindungan Hukum 34
B. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* 39
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA.....**50**
A. Pemindahan Ibu Kota Negara.....50
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara.....59

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH **77**

A. Analisis Kebijakan Publik terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Perlindungan Masyarakat Adat 77

B. Analisis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah 82

C. Analisis *al-Ḍarūriyyāt al-Khams* terhadap Dampak Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara bagi Masyarakat Adat 86

BAB V **95**

PENUTUP **95**

A. Kesimpulan 95

B. Saran 96

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Norma Yang Menimbulkan Pertentangan Dan Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional Masyarakat Adat.....20

Tabel 3.3 Kecamatan Suku Balik.....68

Tabel 3.4 Kecamatan Suku Paser 69

Tabel 3.5 Kecamatan Dayak Benuaq.....70

Tabel 3.6 Wilayah Penyangga 71

DAFTAR GAMBAR

3.1 Peta wilayah Kalimantan sebagai lokasi pemindahan Ibu kota Negara.....66

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jauhar, Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, Juz 6. Beirut: *Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi*, 1972.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. *Tentang Kemaslahatan Umat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Virginia: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.

Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa *Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*. Diterjemahkan oleh A. Qodri Azizy, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. 2005.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah* as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

_____. Maqasid Syariah: *Filosofi Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Syafiq Mughni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. Terj. 'Ali 'Abdelmon'im. Bandung: Mizan, 2015.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Memahami Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Terj. Samodra Wibawa, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 14th ed. Boston: Pearson, 2013.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

_____. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harianto, H. *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Indrati, Maria Farida. Il*mu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Misno BP, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia. 2021

Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Nasution, M. Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

_____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Rahmadi, Takdir. Mediasi: *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan* Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Ter Haar, B. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat.* Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

JURNAL/SKRIPSI/THESIS

Abby, Fat'hul Achmadi. "*Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan*." Al'Adl VIII (2016): 45–64.

Abrori, A.F., S.R.S. Anwar, dan E.I. Rohmah. "*Rekonstruksi Konstitusional Perlindungan Hak Tanah Adat dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia*." Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum 6, no. 4 (2025): 343–345.

Achsoni, Rudhi. "*Ketidakpastian Hukum Pengaturan Perbuatan Tercela dalam Persyaratan Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia*." JUSTISIA Jurnal XVI, no. 24 (2025): 2169–78.

Almaida, Zennia, dkk. "*Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*." jurnal privat law 9 (2021): 218–26.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Alviolita, Fifink Praiseda. "*Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Perbuatan Kriminalisasi dalam Mempertahankan Tanah Ulayat*." Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM 1, no. 1 (2022).

Alyanada, Ambar, dan Irwan Iskandar. "*Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples di Indonesia.*" Journal of International and Local Studies (JILS) Volume 7 Nomor 1 tahun 2023 7, 12–15.

Al Banani, Sabet. "*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lemah dalam Proses Hukum Acara Perdata.*" Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (Vol. 2 No. 1) (2025): 130–37.

Dio Pratama, dkk "*Analisis Status Kepemilikan Tanah Adat dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.*" Jurnal YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam (2024).

Arisaputra, Muhammad Ilham. "*Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Proyek IKN.*" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, no. 1 (2023).

Arrsa, Ria Casmi. "*Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.*" Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 11: 220.

Assihidieq, Muhammad Rifaldi. "*Dampak Sosial yang Telah Terjadi dari Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur*" e Journal Pembangunan Sosial 13, no. 2 (2025): 30.

Aura, S., dan M.Z. Abidin. "*Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN): Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)."* Sanskara Hukum dan HAM 4, no. 1 (2025): 241–254.

Azaria, Nadia Elvin Eka. "*Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*." Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024) 8–10.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Bakar, Abu, Rosyid Basalamah, dan Sri Wahyuni Handayani. "*Tanah Ulayat dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat*" jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 3, Nomor 5, halaman 7140–7145 pada tahun 2025.

Bakri, Asafri Jaya. "*Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*." Jurnal Konstitusi 3, no. 2 (2006): 25–27.

Busro. "*Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam*." Jurnal Ilmiah Mizani 4, no. 1 (2017): 35.

Christiangie, Merry. "*Problematika Hukum Pengadaan Tanah Ibu Kota Nusantara di Wilayah Transmigrasi Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 222/Pdt/2023/PT SMR)*." Journals Faculty of Law Vol 7, no. 2 (2025).

Dzakiah, Wanda Putri, M. Sudirman, dan Benny Djaja. "*Upaya Perlindungan Hukum terhadap Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Kepemilikan Tanah Masyarakat Lokal.*" Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol 2 (2025): 103–106.

Eko, Dicky, dan Muh Ali. "*Beneficiary Pays Principle: Rekonstruksi Pengaturan Pelindungan Lingkungan dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air.*" Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 11 no1 (2024). 10-12

Elrika, Benny Djaja. "*Tinjauan Hukum terhadap Pengadaan Tanah Masyarakat Adat dalam Proyek Ibu Kota Nusantara*.", Academia Open, vol 10 no.2 (2025). 10-11

Fadillah, Ilham. "*Komunikasi Politik Pemerintah dalam Upaya Pemintadan Aparatur Sipil Negara ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN)*." Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Fariz, Tengku, dan Benito Asdhie Kodiyat. "*Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*." EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum 1, no. 3 (2023): 39.

Fernando, Wilson. "*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat IKN, dengan Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat*." Mandalika Law Journal 3401 (2023): 26–39.

Halmadiningrat, I Made, dan Aridiva Firdharizki. "*Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur."* Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 2 (2024): 215–218, 333–374.

Hawali, Evi Lina Sutrisno, dan Luthfi Ahmad. "*Dampak Pembangunan IKN Bagi Masyarakat Lokal: Analisis Pergeseran Habitus, Partisipasi, dan Resolusi bagi Masyarakat Lokal di Kecamatan Sepaku.*" 2025.

Hana Amalia Rahmah, "*pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Perspektif Tata Negara Islam (Fikih Siyasah)*" Skripsi,, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Haq, Andi Saiful, Azhari Azis Samudra, dan Evi Satispi. "*Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara*." Jurnal Sosial Politik vol 11 no 2 (2025): 180.

Haniifaa, Anita Nabila, dan Tajul Arifin. "*Keadilan Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688*." Jurnal Pendidikan Tambusai vol 9, no. 1688 (2025): 18237.

Hasanah, Nur, dan Ismar Hamid. "*Masyarakat Terasering: Aliensi Masyarakat Lokal pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)."* Huma: Jurnal Sosiologi Vol. 4, No. 3 pada tahun 2025, halaman 252-256.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Herdiana, Dian. "*Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*." Jurnal Transformative Vol 8, no. 1 (2022): 6–8.

Hidayat. "*Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara*." Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Vol. 1 No. 1 (2023):

Jamrudin, Hasrin, dan Yeni Widowaty. "*Penguatan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat*." Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 2, Februari 2026, 252-253

Jazuli, Ahmad. "*Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Lingkungan*." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020).

Kurniawati, Rika. "*Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur*." Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 3 (2022): 215–218.

Kusuma, N.A., dan L.D. Pitrianingsih. "*Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Lingkungan*." Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik 8, no. 1 (2025): 78–95.

Kusuma, Wijaya, dkk. "*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*." PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2025.

Lubis, Devi Salvia M. Faisal Rahendra, Nayla Syakila, Shellvy Ella, dan David Roberto Silaban. "*Hak Menguasai Negara VS Hak Ulayat: Dialektika Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Lokal*." Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 8 (2025): 9442.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Lubis, Ikhsan, dkk. "*Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat.*" Jurnal Tugas Agraria Vol 8, no. May (2025): 151.

Maimunah, Siti. *"Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*." Jurnal Masyarakat dan Budaya 22, no. 1 (2020): 54–55.

Mangumpaus, Santriawan, dan Yana Sukma Permana. "*Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum.*" Jurnal Ilmu Hukum VI, no. 2 (2022): 514–516.

Mazda, Chadziqatun Najilatil. *"Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap Social Security*." Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik 6, no. 1 (2022): 55–56.

Muslih, M. "*Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*." Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, 134–137.

Muttaqin, Imam. "*Dari Makna ke Tujuan: Relevansi Maqasid al-Qur'an dalam Dinamika Studi Tafsir Kontemporer*." Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS) vol 6, no. 3 (2025): 600.

Nugroho, Bhakti Eko. "*Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibukota Negara*." JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) 6, no. 1 (2022): 68–70.

Nugroho, Wahyu. "*Konsistensi Negara atas Doktrin Welfare State dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan oleh Masyarakat Adat*." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 1, no. 2 (2014): 131–160.

Nurwahidah, dan Asni. "*Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah*." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 3, no. 2 (2022): 261–71.

Pravita, Ni Luh Made Salya Nirmala, dan A.A. Gede Oka Parwata. "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 terhadap Hutan Adat*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dan Eksistensi Masyarakat Adat." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 10, no. 4 (2021).

Putra, Tovino Ade, Rike Ayu Pinastiya Dinar Anggraini, dan Khansa Adelia Labibah. "*Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Baru terhadap Masyarakat Adat*." Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1 (2024): 1–3.

Rahim, Abdul. "*Perlindungan Hukum terhadap Ahli dalam Proses Peradilan (Legal Protection for Experts in the Judicial Process).*" The Prosecutor Law Review, Volume 1, No. 2, Agustus 2023, 42-44.

Rahman, Abdul. "*Masyarakat Adat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur di Tengah Pembangunan Ibu Kota Negara: Sebuah Kajian Antropologi Ekologi.*" Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies Vol 3, no. 5 (2023): 48–49.

Raihan, Y.D., A. Kassandra K.D., dan H. Baharudin M. "*Kebijakan Pemerintah Terkait Upaya Implementasi Kajian AMDAL Guna Mewujudkan IKN Berdasar Sustainable Development*." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 2, no. 8 (2024): 284–285.

Riana. "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo.*" Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2025, 487-489

Rosliana, Rina. "*Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup."* Jurnal RechtsVinding 7, no. 3 (2018).

Sabri, Nafsi. "*Maqashid Syariah sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam*." Jurnal Elkahfi 3, no. 1 (2022).

Sari, Ria Maya. "*Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*." Jurnal Rechts Vinding 9, no. 1 (2020): 101–102.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Shalih, O., dkk. " *Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya.*" Jurnal Academia Praja 1 (2018). 7-10

Shebubakar, Arina Novizas, dan Marie Remfan Raniah. "*Hukum Tanah Adat/Ulayat.*" Jurnal Magister Ilmu Hukum IV, no. 1 (2019). 16-18.

Subekti, Rahayu. "*Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*." Yustisia 5, no. 2: 379–381.

Ulhaq, Mhd. Jundi Zia, Muhammad Darwis, dan Rudiadi. "*Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*." Journal of Sharia and Law 2, no. 1 (2023): 280–81.

Wicaksono, Muki T., dan Malik. "*Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan ke Arah Transisi 2019*." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 4, no. 2 (2018).

Wijaya, Happy Trizna. "*Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat.*" Mimbar Keadilan 13 (2020): 110–12.

Wijaya, Hendra, dan Andri Pranata. "*Ganti Rugi Tanah di Ibu Kota Nusantara: Tinjauan Hukum dan Kendala Pengadaan*." International Journal of Politic, Public Policy And Environment vol 4 (2024): 6–8.

Yusuf, Saifullah, dan Deasy Yunita Siregar. "*Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyasah*." EScience Humanity Journal 5, no. 1 (2024): 67–78. doi:10.37296/esci.v5i1.198.

Zainuddin Ali. "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 1 (2017): 12.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Harsono, Soni. "*Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Negara.*" Jurnal Agraria & Pertanahan 8, no. 1 (2022): 45.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024.

DATA ELEKTRONIK

Ayunda, Isnah. "*Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara Tergusur oleh Pembangunan IKN*." Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 11 Maret 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

https://www.aman.or.id/story/masyarakat-adat-di-penajam-paser-utara-tergusur-oleh-pembangunan-ikn , Diakses 12 Desember 2025.

BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. "*Refleksi Tsunami 1979*." https://bnpb.go.id/berita/refleksi-tsunami-1979. Diakses 7 Desember 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. "*Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*." https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html. Diakses 7 Desember 2022.

Gunawan, Apriadi, "*Masyarakat Adat Diabaikan, UU IKN Melanggar Hak Konstitusional Warga*." https://aman.or.id/news/read/1401, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara . Diakses 26 April 2022.

Widi, Shilvina., "*Jakarta, Provinsi Paling Padat di Indonesia*." https://dataindonesia.id/ragam/detail/jakarta-provinsi-paling-padat-di-indonesia. Diakses 7 Desember 2022.

Kompas.com. "*Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota*." https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota. Diakses 16 Agustus 2019.

Widadi, Nicky Aulia, dan Oki Budhi. "*Masyarakat Lokal 'Merasa Terusir' dari Tanah Mereka saat IKN Digadang Jadi Magnet Ekonomi Baru*." BBC News, 27 Maret 2024 https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo. Diakses 12 Desember 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/